

MEMAKNAI KONFLIK DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI MELALUI PENDEKATAN KONFLIK FUNGSIONAL

Oleh:

Mohammad Syawaludin

Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam

Fakultas Adab dan Budaya Islam UIN Raden Fatah Palembang

Abstract:

*The term conflict comes from the Latin verb *configere* meaning “hit” each other. In the process development, the word *configere* adopted into the English language, that is *conflict*, which adopted also in the Indonesian language, meaning *konflik*. Experts have suggested a variety of definitions of conflict, the definition has different terms although essentially the meanings are the same. This is caused a conflict of meaning expressed from different scientific perspectives.*

Keywords: *-conflict,- dyadic,- claim,- lawsuit*

A. Latar Belakang

Dalam Sosiologi dikenal dengan istilah konflik kelompok (*group conflict*), konflik manajemen (*management conflict*), dan konflik sistem (*system conflict*).¹ Sementara itu, Laura Nader dan Harry Todd mengemukakan tiga fase dalam suatu proses sengketa yakni: 1) tahap pra konflik atau *grievancel preconflict*; 2) tahap konflik atau *conflict period*; dan 3) tahap sengketa atau *dispute period*.² Apa yang dimaksud dengan tahap pra konflik adalah suatu keadaan atau kondisi di mana seseorang atau kelompok merasakan adanya ketidakadilan. Tahap ini dapat mengalami eskalasi melalui konfrontasi atau berubah menjadi konflik dan bisa pula diredam.

Tahap tersebut dicirikan sebagai tahap nomadik (konflik satu arah yang dilakukan oleh pihak yang merasa tidak mendapatkan ketidakadilan). Bila pihak yang merasa dirugikan tersebut melakukan suatu tindakan kepada pihak yang dianggap

¹Ahmad Ali, *Sosiologi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: Iblam, 2004), h. 63.

²T.O. Ihromi (ed.), “Beberapa Catatan Mengenai Metode Sengketa yang Digunakan dalam Antropologi Hukum”, dalam *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), h. 210-1.

sebagai pihak yang merenggut haknya, maka inilah yang disebut tahapan konflik diadik (*dyadic*). Adapun tahap sengketa (*dispute*) merupakan akibat dari adanya eskalasi tahap konflik, di mana sengketa yang terjadi diketahui masyarakat umum dan banyak pihak yang terlibat di dalamnya (*tryadic*). Masing-masing tahap tidak selalu terjadi secara berurutan, sebab pihak yang merasa ketidakadilannya terancam bisa saja mengeskpresikan ketidakpuasannya ke tahap sengketa tanpa melalui tahap pre konflik.

Namun, menurut Kovach bila dilihat dari asal kata *conflict* yang berasal dari bahasa Latin *con* dan *fligere* (*con* = *together* dan *fligere* = *to strike*), maka konflik adalah *as an encounter with arms, a fight, a battle, a prolonged struggle*.³ Wolf berpandangan makna konflik bisa dilihat secara terminologi. Konflik merupakan gambaran situasi atau keadaan di mana terdapat dua atau lebih orang yang terlibat dalam pertentangan, perselisihan dan perbedaan tujuan atau kepentingan,⁴ ini juga umumnya terkait dengan dimensi politik, etika dan psikologis, dan ekonomi.

Sementara itu, Kriekhof senada dengan Nader dan Todd bahkan memperjelas perbedaan konflik dan sengketa. Bila konflik suatu pertentangan dua orang atau lebih secara terbuka dan terang-terangan, baik terkait dengan kepentingan (*conflict of interest*) atau klaim atas hak (*claim of right*), sedangkan sengketa merupakan suatu perselisihan khusus yang terkait dengan fakta, hukum atau kebijakan di mana dua belah pihak saling berhadapan dan melakukan saling claim atau menolak.⁵

Menurutnya, antara konflik dan sengketa dapat dilihat dari suatu kondisi yang mengelilingi fenomena yang terjadi dari sisi proses yakni sebagai berikut. Tahap pra konflik adalah suatu keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang; kemudian tahap konflik, yakni: suatu tahapan kondisi di mana para pihak menyadari tentang adanya perasaan tidak puas tersebut tetapi belum dinyatakan dalam tindakan. Pada

³Lihat dalam ulasan Sudharto P. Hadi, *Resolusi Konflik Lingkungan* (Semarang: B.P. UNDIP, 2006), h. 2.

⁴Stefan Wolf, *Ethnic Conflict: A Global Perspective* (New York: Oxford University Press, 2006), h. 58-9.

⁵Lihat ulasan Valerine J.L. Kriekhoff, "Mediasi: Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum", dalam T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum*, h. 225.

tahapan selanjutnya adalah sengketa, yakni: suatu keadaan di mana konflik dinyatakan di muka umum dan melibatkan para pihak. Jadi, antara konflik dan sengketa keduanya merupakan rangkaian suatu proses dari suatu peristiwa yang menghilangkan keadilan dan menimbulkan rasa ketidakpuasan satu pihak terhadap pihak lainnya.

B. Genealogi Konflik

Istilah konflik sering dipakai dalam terma ilmu Sosiologi, sedangkan istilah sengketa sering dipakai dalam term Ilmu Hukum. Sengketa menjadi istilah baku dalam hukum karena terkait dengan ranah perdata atau kasus perdata untuk membedakan dengan kasus tindak pidana. Sebagaimana Luthans mendefinisikan konflik sebagai: “*a consequence of a person's response to what he perceived the situation or the behavior of others*”. Maksudnya, konsekuensi dari respon seseorang pada apa yang ia persepsikan mengenai situasi atau perilaku dari orang lain.⁶

Bartos dan Wehr,⁷ menyatakan bahwa konflik sesungguhnya situasi di mana terjadinya suatu pertentangan dan permusuhan di antara para aktor dalam mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu: kepentingan. Menurutnya, ada kriteria situasi konflik, yakni: pertentangan (*incompatibility*), permusuhan (*hostility*), dan perilaku konflik (*conflict behavior*).

Pruitt dan Rubin,⁸ mendefinisikan konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*). Untuk lebih jelasnya tentang konflik kepentingan. Yang dimaksud dengan kepentingan (*interest*) dalam konteks ini adalah sebuah pertentangan atau perbedaan keinginan atau tujuan yang sesungguhnya diinginkan. Kepentingan dapat berwujud keinginan akan rasa aman dari ancaman (*threat*), keinginan mendapatkan kekuasaan (*power*) dan hidup yang

⁶ F. Luthans, *Organizational Behaviour* (New York: McGraw Hill Publishing Company, 1973), h. 199.

⁷ Bartos J. Otomar and Paul Wehr, *Using Conflict Theory* (Cambridge University Press, 2002), h. 12-22.

⁸ Pruitt G. Dean dan Rubin Z. Jeffrey, *Teori Konflik Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 77-106.

lebih baik (*survive*). Konflik kepentingan beragam dimensi dan manifestasinya, bisa berwujud dalam bentuk pertarungan nilai-nilai, kekuasaan dan sumber-sumber langka.

Perbedaan kepentingan setidaknya menunjukkan adanya motif individu atau kelompok yang mengalami konflik. Selanjutnya, konflik didasarkan pada motif kepentingan ini -menurut Kriesberg- adalah: “*conflict exists when two or more persons or groups manifest the belief that have incompatible objectives*”.⁹ Konflik kepentingan yang menekankan pada motif pertarungan kekuasaan (*struggle of power*) dan perebutan dominasi sumber-sumber daya yang langka (*resources and position scarcity*) lebih berdimensi pada penghampiran konflik politik (*political conflict approach*).

Gurr berpendapat bahwa setidaknya ada empat persyaratan agar dapat dikategorikan konflik dalam masyarakat,¹⁰ yaitu: [1] terdapat dua atau lebih pihak (individu atau kelompok) yang terlibat, [2] mereka terlibat dalam tindakan-tindakan yang saling memusuhi, [3] mereka menggunakan perlakuan-perlakuan kekerasan yang bertujuan untuk menghancurkan, melukai, dan menghalang-halangi lawannya, dan [4] reaksi pertentangan ini bersifat terbuka sehingga dapat dideteksi dengan mudah oleh orang lain (*observer*). Dahrendoef menunjukkan ciri-ciri penyebab terjadinya konflik,¹¹ yaitu: karena tidak tercapainya kepentingan dari individu maupun kelompok (*party*); keinginan memperbaharui kepentingan, dan adanya rasa cemburu, ketidakkesenangan kesuksesan atau kelompok komunitas tertentu.

Terkait pandangan Dahrendoef di atas, tampaknya sejalan dengan Aamodt M.G., bahwa konflik adalah sebagai reaksi psikologis dan perilaku (*behavioral*) atas suatu persepsi bahwa individu lain menghalangi Anda untuk mencapai suatu tujuan, menjauhkan hak Anda untuk bertindak dalam suatu cara tertentu, atau mengacaukan

⁹Louis Kriesberg, *Constructive Conflicts from Escalation to Resolution* (Lanham: McRow Man and Little Field, 1998), h. 31 dan 343.

¹⁰Gurr Robert Ted (ed.), *Handbook of Political Conflict: Theory and Research* (New York: The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc. 1980).

¹¹R. Dahrendoerf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa Kritik* (Jakarta: Rajawali, 1986).

pengharapan dari suatu hubungan.¹² Black memberikan definisi tentang konflik sebagai buah dari *dispute a conflict or controversy*, yaitu: *a conflict of claim or right; an assertion of a right, claim or demand one side, met by contrary claims or allegations on the other, the subject of litigation.*¹³ Maksudnya, konflik atau kontroversi, konflik mengenai klaim hak, pernyataan suatu hak, klaim atau tuntutan di satu pihak berhadapan dengan pihak lainnya di mana terkait dengan hukum.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan W.L. French, dkk., yang menyatakan bahwa konflik adalah interaksi perilaku dua atau lebih individu, kelompok, atau sistem sosial yang lebih besar yang memiliki tujuan yang bertentangan.¹⁴ Menurut Donald F Faules dan R. Wayne Pace, konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami.¹⁵

“Conflict is an expression of conflict between individuals with other individuals, groups with other groups for several reasons. In this view, the dispute reflects differences between two or more individuals who expressed, remembered, and experienced”.

Joce L. Hoker dan William W. Wilmot mendefinisikan konflik sebagai *“An expressed struggle between at least two interdependent parties who perceived incompatible goal, scarce rewards and interference from other party in achieving their goals”.*¹⁶ Maksudnya, sebuah perjuangan yang diungkapkan antara sedikitnya dua pihak saling tergantung yang dirasakan tidak sesuai tujuannya, *rewards*, dan

¹²M.G. Aamodt, *Industrial Organizational Psychology: An Applied Approach*, 5th edition, (California: Thomson Wadsworth, 2007), h. 22.

¹³Henry Campbell Ballack, *Black Law Dictionary: Difinitions of the Term and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern*, sixth edition (Paul Min West Publishing Co, 1990), h. 471.

¹⁴W.L. French, *et al.*, *Understanding Human Behaviour in Organizations* (New York: Harper & Row Publishers, 1985), h. 34.

¹⁵Donald F. Faules and R. Wayne Pace, *Organizational Communication* (Paperback, Revised, 1993), h. 249.

¹⁶Joyce Hocker and William Wilmot, *Interpersonal Conflict*, 2nd ed. rev., (Dubuque, Iowa: Wm. C. Brown Publishers, 1985), h. 236.

langka perjuangannya dan ada gangguan dari pihak lain dalam mencapai tujuan mereka".

Joel A. Di Girolamo mengungkapkan bahwa konflik adalah "A process that begins when an individual or group perceives differences and opposition between itself and another individual or group about interests and resources, beliefs, values, or practices that matter to them".¹⁷ Menurutnnya, konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika seorang individu atau kelompok memandang perbedaan dan pertentangan antara dirinya sendiri dan individu lain atau kelompok tentang kepentingan dan sumber daya, keyakinan, nilai, atau praktek yang penting bagi mereka.

Menurut Kirk Blackard dan James W.Gibson konflik adalah "A dynamic process reflecting the interaction of two or more interde who have pendent parties same level of difference or incompatibility between them."¹⁸ Sebuah proses dinamis yang mencerminkan interaksi dari dua atau lebih yang memiliki *interde* pihak independen tingkat yang sama perbedaan atau ketidakcocokan di antara mereka.

Menurut Paul Collier,¹⁹ konflik yang berlangsung terus-menerus, dan tidak menemukan solusinya yang tepat, melahirkan dua perspektif, yaitu: *greed* dan *grievance*. Menurutnnya, konflik bisa diartikan dari dua pandangan perspektif tersebut. Dalam perspektif *greed*, konflik adalah sesuatu *event* yang menguntungkan karena adanya peluang melakukan eksploitasi masyarakat melalui propaganda politik. Dalam situasi konflik itu segala cara yang dapat dilakukan untuk mendatangkan keuntungan, seperti halnya melakukan mobilisasi massa dan manipulasi fakta dalam mediskreditkan lawan-lawan politiknya.

¹⁷Joel A. Digirolamo, *Conflict in Organitation*, (Turbi charged Leadership by Paranopower Inc., 2008), h. 4.

¹⁸Kirk Blackard and James W. Gibson, *Capitalizing of Conflict: Strategies and Practices for Turning Conflict into Synergy in Organizations*, (California: Davies-black Publishing Palo Alto, 2002), h. 4.

¹⁹Collier Paul, *Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy*, (Washington D.C.: The World Bank, 2003), h. 33.

Untuk itu, jika ingin *survive*, maka konflik harus diciptakan dan berupaya agar situasi masyarakat berlangsung terus-menerus dalam keadaan disharmonisasi. Sementara dalam perspektif *grievance* konflik dipandang sebagai ketidakadilan karena dapat merugikan, terdzalimi serta dapat mengancam eksistensinya. Mereka yang mengalami ketidakadilan dan rasa kekecewaan yang mendalam, akan melakukan tindakan *emergency* untuk menyelamatkan diri dari berbagai ancaman, yaitu mau tidak mau harus melakukan perlawanan dengan segala strategi dan resiko.

Grievance merupakan salah satu sumber potensi terjadinya akumulasi kekecewaan dan rasa frustrasi yang dapat berwujud dalam bentuk tindakan aksi kolektif yang irrasional. Bahkan dapat menjadi sebuah formulasi gerakan sosial untuk melakukan perlawanan. Oleh karena itu, menurut Gurr,²⁰ konflik, di samping tidak menguntungkan (*disadvantaged*), akan menggiring ke arah marjinalisasi dan diskriminatif dalam lingkungan politiknya. Hal ini bisa terjadi karena menyangkut ancaman eksistensi masa depan, sehingga mereka berupaya melakukan perlawanan dan mencari tindakan alternatif lain untuk merebut dan memperoleh kepentingan untuk hidup yang lebih layak.

Menurut Collier,²¹ salah satu penyebab terjadinya konflik adalah adanya persaingan dalam memperebutkan *resources* yang langka atau sangat terbatas. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Oberg dan Strom,²² yang menyatakan bahwa *resources* bisa menjadi sumber konflik jika terjadi ketimpangan dalam pendistribusiannya, “*disputes over the control over resources, or the distribution of resources, are potensial reasons for civil conflict*”.

²⁰Ted Gurr Robert (ed.). *Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflicts*, (Washington D.C.: United State Institute of Peace Press. 1993), h. 373.

²¹Collier Paul, *Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy*, (Washington, DC.: The World Bank, 2003)

²²Oberg Magnus and Strom Kaare (ed.), *Resources, Governance and Civil Conflict*, (London: Routledge and New York: Taylor & Francis Group, 2008).

Istilah konflik merupakan *a dynamic change* dan bisa bersifat positif dan akan menjadi destruktif bila tidak dikelola secara baik dan benar menurut Coser sebagaimana dikutip Oberschall,²³ mendefinisikan konflik sebagai berikut:

“Social conflict is a struggle over values or claims to status, power, and scarce resources, in which the aims of the conflict groups are not only to gain the desired values, but also to neutralise, injure, or eliminate rivals”

(konflik sosial adalah perjuangan atas nilai-nilai atau klaim terhadap sumber daya status, kekuasaan, dan langka, di mana tujuan dari kelompok konflik tidak hanya untuk mendapatkan nilai yang diinginkan, tetapi juga untuk menetralkan, melukai, atau menghilangkan saingan).

C. Konflik Fungsional Coser

Lewis A. Coser berpendapat bahwa perubahan sosial tidak semata terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Disini Coser mengajukan konsepsi teori konfliknya bahwa suatu fakta konflik diperbaiki dengan cara menekankan pada sisi konflik yang positif yakni bagaimana konflik itu dapat memberi sumbangan pada tatanan dan adaptasi dari kelompok, interaksi dan sistem sosial atau ia sebut dengan istilah konflik fungsional.

Coser menyatakan bahwa konflik itu bersifat fungsional (baik) dan bersifat disfungsional (perpecahan) bagi hubungan dan struktur-struktur yang tidak terangkum dalam sistem sosial sebagai suatu keseluruhan.²⁴ Coser mengatakan bahwa konflik dapat mengubah bentuk interaksi. Proposisi-proposisi mengkambinghitamkan bisa diterima oleh penguasa yang secara jelas akan menunjukkan adanya hubungan dominasi dan konflik kepentingan, pihak yang dominan dan pihak penguasa akan mendapatkan keuntungan dari suasana konflik yang terjadi.

²³Lihat Lewis Coser, *The Functions of Social Conflict*, (New York: Free Press, 1956), h. 23-4. Lihat juga A. Oberschall, *Theories of Social Conflict: Annual Review of Sociology*, Vol. 4, 2008, h. 291-315.

²⁴Wallance dan Wolf, *Reading in Contemporary Sociological Theory from Modernity to Post Modernity*, (New Jersey: Prentice Hall, 1995), h. 156.

Bahkan, menurut Coser suatu konflik yang terjadi dipandang fungsional positif sejauh konflik tersebut memperkuat kelompok dan sebaliknya memiliki fungsional negatif sejauh konflik tersebut bergerak melawan struktur. Sebab, konflik secara positif dapat meredakan ketegangan yang terjadi dalam suatu kelompok yang memantapkan keutuhan dan keseimbangan, dia menjelaskan dari hasil pengamatan terhadap masyarakat dimana ternyata terdapat adanya hubungan antara peningkatan konflik dalam kelompok dengan peningkatan interaksi dengan dan ke dalam masyarakat secara keseluruhan.

Homogenitas mungkin penting bagi kelangsungan suatu kelompok terisolir yang berarti konflik internal tidak ada dan hal ini juga dapat berarti lemahnya interaksi kelompok tersebut dengan masyarakat secara keseluruhan. Penekanan yang diutamakan dalam konflik fungsional ini menurutnya adalah penciptaan tipe isu yang sekaligus dijadikan sebagai subjek di dalam konflik itu. Konflik fungsional positif bilamana tidak mempertanyakan dasar-dasar hubungan dan fungsional negatif jika menyerang nilai inti.

Jelaslah bahwa konflik pada pendekatan ini cenderung merusak dan memecah belah tetapi tetap terkait dan memiliki kohesi guna penciptaan keseimbangan kekuatan dan sekaligus dijadikan sebagai sarana bagi kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan kondisi pada masyarakat. Dengan mengacu pada pengertian konseptual tentang konflik sosial tersebut, maka proses konflik sosial akan meliputi spektrum yang lebar. Isu-isu kritis yang meringkai konflik sosial yang seringkali dijumpai dalam sistem sosial (di segala tataran) adalah:

1. Konflik antar kelas sosial (*social class conflict*) sebagaimana terjadi antara “kelas buruh” melawan “kelas majikan” dalam konflik hubungan-industrial, atau “kelas tuan tanah” melawan “kelas buruh-tani” dalam konflik agraria.
2. *Modes of production conflict* (konflik moda produksi dalam perekonomian) yang berlangsung antara kelompok pelaku ekonomi bermodakan (cara-produksi) ekonomi *peasantry-tradisionalism* (pertanian skala kecil subsisten-sederhana)

melawan para pelaku ekonomi bersendikan moral-ekonomi akumulasi profit dan eksploitatif.

3. Konflik sumberdaya alam dan lingkungan (*natural resources conflict*) adalah konflik sosial yang berpusat pada isu *claim* dan *reclaiming* penguasaan sumberdaya alam (tanah atau air) sebagai pokok sengketa terpenting. Dalam banyak hal, konflik sumberdaya alam berhimpitan dengan konflik agraria, di mana sekelompok orang memperjuangkan hak-hak penguasaan tanah yang diklaim sebagai *property* mereka melawan negara, badan swasta, atau kelompok sosial lain.
4. Konflik ras (*ethnics and racial conflict*) yang mengusung perbedaan warna kulit dan atribut sub-kultural yang melekat pada warna kulit pihak-pihak yang berselisih.
5. Konflik antar-pemeluk agama (*religious conflict*) yang berlangsung karena masing-masing pihak mempertajam perbedaan prinsip yang melekat pada ajaran masing-masing agama yang dipeluk mereka.
6. Konflik sektarian (*sectarian conflict*), adalah konflik yang dipicu oleh perbedaan pandangan atau ideologi yang dianut antar pihak. Konflik akan makin mempertajam perbedaan pandangan antar mazhab (seringkali pada ideologi yang sama).
7. Konflik politik (*political conflict*) yang berlangsung dalam dinamika olah kekuasaan (*power exercise*).
8. *Gender conflict* adalah konflik yang berlangsung antara dua penganut pandangan berbeda dengan basis perbedaan adalah jenis-kelamin. Para pihak mengusung kepentingan-kepentingan (politik, kekuasaan, ekonomi, peran sosial) yang berbeda dan saling berbenturan antara dua kelompok penyokong yang saling berseberangan.
9. Konflik-konflik antar komunitas (*communal conflicts*), yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti: eksistensi identitas budaya komunitas dan faktor sumberdaya kehidupan (*sources of sustenance*). Konflik komunal seringkali bisa

berkembang menjadi konflik teritorial jika setiap identitas kelompok melekat juga identitas kawasan.

10. Konflik teritorial (*territorial conflict*) adalah konflik sosial yang dilancarkan oleh komunitas atau masyarakat lokal untuk mempertahankan kawasan tempat mereka membina kehidupan selama ini. Konflik teritorial seringkali dijumpai di kawasan-kawasan hak pengusahaan hutan (HPH), di mana komunitas adat/lokal merasa terancam sumber kehidupan dan identitas sosio-budayanya manakala penguasa HPH menghabisi pepohonan dan hutan di mana mereka selama ini bernaung dan membina kehidupan sosial-budaya dan sosio-kemasyarakatan.
11. *Inter-state conflict* adalah konflik yang berlangsung antara dua negara dengan kepentingan, ideologi dan sistem ekonomi yang berbeda dan berbenturan kepentingan dengan pihak lain negara.
12. Dalam kecenderungan global, *inter-state conflict* bisa berkembang menjadi *regional conflict*.²⁵

Karena itu, Coser memahami konflik sebagai suatu yang inheren dalam sistem masyarakat; dan ini tak lepas dari fakta hubungan kekuasaan dalam sistem sosial dan sifat kekuasaan yang mendominasi dan diperebutkan. Fakta ini menciptakan *steering problem*. Baginya, konflik merupakan kondisi dominasi struktural, kelompok yang berada di dalam struktur dengan berbagai perangkat kewenangan mampu mengarahkan berbagai bentuk kebijakan dan aturan main di luar struktur wewenang tersebut.

Untuk itu, setiap kelompok harus dengan sungguh-sungguh berjuang dengan cara apapun. Sejalan dengan pandangan ini, Barry Buzan berpendapat jika aktor-aktor atau kelompok ingin eksis dan *survive*, maka mereka yang berkonflik harus melakukan sekritisasi isu-isu yang berkaitan dengan *grievance*. Dalam pandangan

²⁵Diadopsi dari Arya Hadi Dharmawan, dalam Seminar PERAGI Pontianak, 10-11 Januari 2006.

Buzan, strategi sekuritisasi adalah sangat penting untuk meraih tujuan atau kepentingan aktor yang bersifat *greedy*.²⁶

Sebagaimana yang dikemukakan oleh C. Bartos dan Wehr teori Coser memberi jalan bagi penjelasan tindakan koersif dan fase konflik mendefinisikan konflik sebagai situasi pada saat para aktor menggunakan perilaku konflik melawan satu sama lain untuk menyelesaikan tujuan yang berseberangan atau mengekspresikan naluri permusuhan.²⁷ Unsur perilaku konflik sebagai unsur pemicu terjadinya konflik, sebab *incompatible goal* dan *hostility feeling* membutuhkan perilaku konflik secara sosial.

Perilaku konflik dipilah menjadi tindakan koersif dan non-koersif, menurut Bartos dan Wehr, tindakan koersif merupakan bentuk tindakan sosial yang memaksa pihak lawan untuk melakukan sesuatu yang pihak lawan tidak inginkan. Tindakan koersif itu sendiri ada dua yakni *actual coercion* dan *threat coercion* (koersif nyata dan koersif ancaman). Aktual koersif muncul dalam bentuk melukai ataupun membunuh lawan atau dalam bentuk penyiksaan psikologis. Tujuan utama dari aktual koersif ini adalah menghentikan kemampuan lawan untuk meneruskan konflik.²⁸

Sedangkan *threat coercion* bertujuan untuk menekan agar lawan menurunkan keinginannya mencapai tujuan bentuknya intimidasi sekaligus negoisasi. *Non coercion action* adalah upaya mencari jalan keluar dari hubungan konflik, ada tiga bentuk model ini yakni persuasip, menjanjikan penghargaan, dan kerja sama, namun model tindakan ini juga bisa muncul sebagai strategi konflik sebelum suatu kelompok menggunakan *coercive action*.²⁹

Bartos dan Wehr juga menggunakan logika sebab-akibat untuk melihat tingkat tindakan koersif (*degree of coerciveness*) dari suatu hubungan konflik.³⁰ Menurutny, peningkatan tindakan dari pihak X akan merangsang peningkatan

²⁶Buzan Barry, *et al.*, *Security: A Framework for Analysis*, (The United State of America: Lynne Rienner. 1998), h. 22-26

²⁷O.J, Bartos dan Paul Werh, *Using Conflict Theory*, h. 13-16

²⁸*Ibid.*, h. 26

²⁹*Ibid.*, h. 28-29

³⁰*Ibid.*, h. 27

tindakan dari pihak Y. Tingkatan koersif ketika berada dalam suatu hubungan konflik akan menciptakan dinamika konflik. Dinamika konflik ditandai terlebih dahulu oleh fase-fase konflik. Bartos dan Wehr membagi konflik menjadi dua fase yaitu: solidaritas konflik (*conflict solidarity*) dan fase sumber-sumber konflik (*conflict resources*).

Solidaritas konflik adalah terciptanya konflik menuju tingkatan kompleksitas, melalui banyaknya terlibat pihak-pihak lain dalam konflik tersebut. Proses ini berlangsung melalui tiga proses yaitu terdapat interaksi individu-individu secara intensif, ada rasa suka dan percaya terhadap yang lainnya, ada kemiripan dan kesamaan nilai-nilai dan norma. Ketiga proses ini akan teraktualisasi manakala dipicu adanya fakta *hostility* (kekejian, kekejaman). Ada dua bentuk *hostility* yakni frustrasi dan keluhan (*grievances*).³¹ Dalam solidaritas konflik dicirikan beroperasinya ideologi dalam kelompok, memberi doktrin perlawanan, selanjutnya terdapat pengorganisasian anggota dan struktur sehingga bisa dirumuskan berbagai strategi konflik. Kemudian ada kegiatan mobilisasi massa dengan mengefektifkan seluruh sumber daya untuk memenangkan konflik.

Fase selanjutnya adalah sumber konflik, yaitu proses kelompok-kelompok berkonflik memanfaatkan instrumen-instrumen tertentu untuk menghadapi konflik. Eskalasi konflik adalah meningkatnya berbagai tindakan koersif kedua belah pihak yang berkonflik sehingga aksi kekerasan dipamerkan. Disini dibutuhkan strategi eskalasi yakni respons rasional dari satu pihak berkonflik. Deskalasi konflik adalah situasi yang muncul dengan ditandai dan disebabkan oleh penurunan aktivitas solidaritas konflik, sumber daya konflik dan strategi eskalasi konflik yang terjadi.³²

Bagi Coser suatu konflik merupakan bentuk kesadaran yang mencerminkan semangat pembentukan, pembaharuan dan penyatuan di dalam masyarakat terhadap lingkungan di sekelilingnya. Karena itu, konflik dapat berarti instrumen perubahan, penyelamatan dan pemeliharaan struktur sosial yang ada atau diperjuangkan oleh

³¹*Ibid.*, h. 70-78

³²*Ibid.*, h. 111-114

masyarakat untuk kehidupannya. Karena itu, konflik yang terjadi sebagai instrumen untuk mendapatkan kembali keadilan yang hilang tersebut.

Coser berpandangan bahwa suatu konflik dalam masyarakat merupakan tanda-tanda adanya hubungan-hubungan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan ketiadaan konflik dapat berarti persoalan-persoalan yang terjadi cenderung untuk dilupakan atau suatu pertanda strategi pembiaran persoalan yang kelak akan menimbulkan kekacauan dan penderitaan. Menurut Coser, kekerasan yang terjadi merupakan bentuk konflik yang memiliki makna positif bagi struktur sosial dan kelompok sosial. Salah satunya adalah fungsi pendefinisian kelompok. Dengan adanya konflik, maka akan memperjelas identitas dan batas dengan kelompok sosial lainnya. Perspektif Coser, sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan kekerasan dan konflik yang berlangsung saat ini, karena semuanya merupakan proses alami dalam rangka keseimbangan struktur sosial.³³

Jadi, Coser dengan teori fungsi sosial konflik menjelaskan beberapa hal, di antaranya, sebagai berikut:

1. Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial.
2. Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok.
3. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindungi agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya.
4. Katup penyelamat (*safety-valve*) ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial.

Pentingnya memahami dan mempelajari penggunaan teori fungsional konflik Coser terletak pada penjelasan suatu proses muncul dan terbentuknya konflik dan eskalasi interaksi sosial di lingkungannya. Selain itu, teori ini juga mengelaborasi bagaimana suatu konflik membentuk penyatuan dan pembaharuan dalam suatu

³³ Coser, *The Functions of Social Conflict*, h. 55-60

struktur sosial agar tidak terisolir. Sebab berbagai konflik yang terjadi didalam masyarakat bisa berlangsung di dalam setiap ruangan ataupun melibatkan agensi atau struktur antar-ruangan.³⁴ Dengan elaborasi aspek isu-isu konflik dan sumber konflik dalam setting interaksi sosial yang terjadi, maka akan dapat diperjelas isu-isu soal asal-usul tanah, wilayah, identitas, status, eksistensi, dan cara pihak-pihak melakukan perilaku penyelamatan dan permusuhan.

Selanjutnya Coser memberikan pembagian konflik menjadi realities dan non realities. Pembagian ini menjadi dasar atau kunci pembuka untuk menggunakan berbagai instrument teori konflik fungsional Coser. Coser membedakan dua tipe dasar konflik yang realistik dan non-realistik. Menurutnya, konflik realistik memiliki sumber yang kongkrit atau bersifat material, seperti sengketa sumber ekonomi atau wilayah. Jika mereka telah memperoleh sumber sengketa itu, dan bila dapat diperoleh tanpa perkelahian, maka konflik akan segera diatasi dengan baik. Konflik non-realistik didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis. Konflik ini seperti konflik antar agama, antar etnis, dan konflik antar kepercayaan lainnya. Antara konflik yang pertama dan kedua, konflik yang non-realistiklah cenderung sulit untuk menemukan solusi konflik atau sulitnya mencapai konsensus dan perdamaian.

Bagi Coser sangat memungkinkan bahwa konflik melahirkan kedua tipe ini sekaligus dalam situasi konflik yang sama. Coser mengatakan bahwa konflik dapat mengubah bentuk interaksi. Karenanya,³⁵ proposisi-proposisi mengkambinghitamkan bisa diterima oleh penguasa yang secara jelas akan menunjukkan adanya hubungan dominasi dan kepentingan, selain itu adanya pihak penguasa dari pemerintahan yang akan mendapatkan keuntungan dari suasana konflik yang terjadi. Karena itu konflik tidak hanya persoalan dominasi dan kepentingan perusahaan terhadap kepemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat.

³⁴Diolah dari berbagai data sekunder Arya Hadi Dharmawan, "Konflik-Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat)", *Makalah* untuk Seminar PERAGI, Pontianak, 10-11 Januari 2006.

³⁵Coser, *The Functions of Social Conflict*, h. 154

Tetapi konflik juga memiliki kaitan yang erat dengan terancamnya struktur sosial masyarakat terhadap lingkungannya.

Bagi Coser sendiri teori konflik fungsional merupakan suatu usaha menjembatani teori fungsional dan teori konflik, hal itu terlihat dari fokus perhatiannya terhadap fungsi integratif konflik dalam sistem sosial. Coser sepekat pada fungsi konflik sosial dalam sistem sosial terletak pada konsesus dan konflik sebagai jalan pembaharuan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial itu sendiri agar tidak terisolir dan mampu produktif.

Pada dasarnya Coser melalui teori fungsi sosial konflik menjelaskan beberapa hal di antaranya adalah: Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial, Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok, Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindungi agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya, Katup penyelamat (*safety-valve*) ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial.

D. Penutup

Metodologi yang digunakan Coser dalam teori fungsional konflik sosial adalah menggunakan masyarakat, kelompok atau struktur sosial sebagai sumber informasi. Individu hanya ditempatkan sebatas responden tetapi bukan subjek. Manusia dilihat sebagai produk masyarakat atau internalisasi dari masyarakat. Teori fungsi konflik sosial mengasumsikan individu berada pada posisi yang tidak sepenuhnya otonom dalam hal tindakan sosial.

Termasuk konflik sosial, pada tingkatannya paling umum tentu mempertimbangkan masyarakat sebagai suatu bentuk yang mejemuk dan memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Masyarakat dalam perspektif teori ini sebagaimana struktur sosial dan institusi sosial lainnya, mampu menentukan arah

tindakan yang menguntungkan sistem secara keseluruhan atau tidak, sedangkan individu justru kebalikannya.

Metode Coser terdiri merupakan suatu alat untuk menemukan formulasi dari munculnya sebuah konflik dalam masyarakat yakni: asal usul konflik, sumber dan isu konflik, aktor yang berkonflik, perilaku dan tindakan yang dilakukan dan bentuk dari perilaku aktor yang terwujud menjadi konflik.

Daftar Bacaan

Aamodt, M.G. *Industrial Organizational Psychology: An Applied Approach*, 5th ed. California: Thomson Wadsworth, 2007.

Ahmad Ali. *Sosiologi Hukum, Kajian Empiris terhadap Pengadilan*. Jakarta: Iblam, 2004.

Arya Hadi Dharmawan. "Konflik-Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat)", *Makalah* untuk *Seminar PERAGI*, Pontianak, 10-11 Januari 2006.

Ballack, Henry Campbell. *Black Law Dictionary: Difinitions of the Term and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern*, sixth edition. Paul Min West Publishing Co., 1990.

Barry, Buzan, *et al.* *Security: A Framework for Analysis*. The United State of America: Lynne Rienner. 1998

Blackard, Kirk and James W. Gibson. *Capitalizing of Conflict: Strategies and Practices for Turning Conflict into Synergy in Organizations*. California: Davies-black Publishing Palo Alto, 2002.

Coser, Lewis. *The Funcions of Social Conflict*. NewYork: Free Press, 1956.

Dahrendorf, R. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa Kritik*. Jakarta: Rajawali, 1986.

Dean, Pruitt G. dan Rubin Z. Jeffrey. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

- Digirolamo, Joel A. *Conflict in Organization*. Turbi charged Leadership by Paranopower Inc., 2008
- Faules, Donald F. and R. Wayne Pace. *Organizational Communication*. Paperback, Revised, 1993.
- French, W.L. *et al. Understanding Human Behaviour in Organizations*. New York: Harper & Row Publishers, 1985.
- Hocker, Joyce and William Wilmot. *Interpersonal Conflict*, 2nd ed. rev. Dubuque, Iowa: Wm. C. Brown Publishers, 1985.
- Kriekhoff, Valerie J.L. "Mediasi: Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum", dalam T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Kriesberg, Louis. *Constructive Conflicts from Escalation to Resolution*. Lanham: McRow Man and Little Field, 1998.
- Luthans, F. *Organizational Behaviour*. New York: McGraw Hill Publishing Company, 1973.
- Magnus, Oberg and Strom Kaare (ed.). *Resources, Governance and Civil Conflict*. London: Routledge and New York: Taylor & Francis Group, 2008.
- Oberschall, A. *Theories of Social Conflict: Annual Review of Sociology*, Vol. 4, 2008.
- Otomar, Bartos J. and Paul Wehr. *Using Conflict Theory*. Cambridge University Press, 2002.
- Paul, Collier. *Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy*. Washington D.C.: The World Bank, 2003.
- Paul, Collier. *Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy*. Washinton, DC.: The World Bank, 2003.
- Sudharto P. Hadi. *Resolusi Konflik Lingkungan*. Semarang: B.P. UNDIP, 2006.
- T.O. Ihromi (ed.), "Beberapa Catatan Mengenai Metode Sengketa yang Digunakan dalam Antropologi Hukum", dalam *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.

Ted, Gurr Robert (ed.). *Hand Book of Political Conflict: Theory and Research*. New York: The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc. 1980.

------. *Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflicts*. Washinton D.C.: United State Institute of Peace Press, 1993.

Wallance and Wolf. *Reading in Contemporary Sociological Theory from Modernity to Post Modernity*. New Jersey: Prentice Hall, 1995.

Wolf, Stefan. *Ethnic Conflict: A Global Perspective*. New York: Oxford University Press, 2006.